MENEMUKAN KEARIFAN LINGKUNGAN DALAM POLA PEMUKIMAN KERATON BUTON

M. Nur dan Rustam Awat[1]
(Universitas Hasanuddin)

Abstract

Keraton Buton (the palace of Buton Kingdom) has a settlement pattern which was depicting the spatial arrangement and a function of a complex spatial. The equilibrium of settlement pattern of Keraton Buton has been charged to the Siolimbona, a local custom institution for the last 4 centuries. Since 1960, the Siolimbone were removed and as the result a settlement disorder raised. Environmental wisdom of the custom institution of Siolimbona was proved have more effectiveness compared with local act of present regional government of Buton
Keywords: environmental wisdom, spatial, Siolimbona, settlement.

I. Pendahuluan

Baik untuk kebutuhan konservasi maupun pengembangan ilmu pengetahuan, isu lingkungan telah menjadi tema sentral dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu bentuk tanggapan ilmuan dan praktisi lingkungan di tanah air untuk perbaikan kualitas lingkungan adalah penggalian kearifan lokal yang berhubungan dengan lingkungan (*environmental wisdom*). Meskipun bukan hal baru, upaya penggalian kearifan lingkungan adalah hal serius dan positif. Dalam hubungannya dengan arkeologi, studi arkeologi pemukiman diasumsikan dapat mengungkap aspek kearifan manusia masa lalu dalam mengelola dan memanfaatkan lingkungan.

Alasan kami menggunakan perspektif arkeologi pemukiman dalam analisis dan interpretasi adalah karena kata *kearifan lokal* berkonotasi pewarisan. Sebagaimana diketahui bahwa pewarisan memuat dua dimensi yaitu dimensi waktu (*time*) dan bentuk (*form*). Dimensi waktu di sini bermakna dari masa lalu ke masa sekarang, sedangkan dimensi bentuk adalah apa yang ditransformasikan dalam perjalanan waktu tersebut. Dimensi bentuk dapat berupa gagasan, kepercayaan, perilaku dan lain-lain yang ditransformasikan baik secara lisan maupun tertulis. Dengan demikian, kajian arkeologi pemukiman[2] di sini

[1] M. Nur adalah Dosen Jurusan Arkelogi Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, Makassar. Rustam Awat adalah alumnus S1 Jurusan Arkeologi Unhas, alumnus S2 pada Jurusan Arkeologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

[2] Dalam studi arkeologi pemukiman, beberapa sarjana telah memberikan definisi yang sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda. Seperti Sharer dan Ashmore (1979:421) mendefinisikan arkeologi pemukiman sebagai *study of the spatial distribution of ancient human activities and occupation, ranging from the differential location of activities within a single room to the arrangement of sites in a region.* Masih agak serupa, Mundardjito (2002:3) mendefinisikan sebagai bagian disiplin arkeologi yang mengkhususkan atau memusatkan perhatian pada persebaran okupasi dan kegiatan manusia, serta hubungan-hubungan di dalam satuan-satuan ruang, dengan tujuan memahami sistem teknologi, sistem sosial dan sistem ideologi dari masyarakat masa lalu. Penjelasan lanjut dari definisi ini adalah terdapat tiga unsur utama dalam arkeologi pemukiman yaitu pertama, *persebaran*, kedua *hubungan-hubungan* dan ketiga adalah *satuan ruang serta asumsi-asumsi dasar yang melatarinya.*

dianggap cukup tepat untuk menemukan kearifan lingkungan dalam sistem pemukiman masa lalu karena konsentrasi kajiannya pada rekonstruksi budaya masa lalu.

Dalam perspektif arkeologi pemukiman, Keraton Buton adalah data pemukiman yang sangat menarik. Sejak dibangun secara bertahap[3] pada masa pemerintahan Sultan Buton IV La Elangi (1578-1615), pemukiman benteng ini tidak pernah ditinggalkan dan memperlihatkan eksistensinya dengan baik sampai tahun 1960. Walaupun kondisi lingkungan kurang subur untuk daerah pertanian, masyarakat merasa betah untuk tinggal dan mempertahankan pemukimannya. Hipotesis yang dapat dibuat dari bertahannya pemukiman ini adalah ada sebuah sistem pemukiman yang mapan dimana kebutuhan pemukimnya dapat dipenuhi, baik kebutuhan yang sifatnya ragawi maupun non ragawi.

Dalam kondisi sekarang, pemukiman di dalam Keraton Buton terlihat tidak teratur, baik dari segi bentuk rumah maupun tata letaknya. Padahal, Pemerintah Daerah Kotamadya Bau-Bau telah menetapkan Peraturan daerah (Perda) Nomor 105 tahun 2003[4] untuk mengatur pemukiman tersebut. Kenyataannya, perda tersebut tidak efektif untuk mengatur bentuk dan tata letak bangunan. Padahal, berdasarkan data arkeologis yang kami temukan, ada kontradiksi besar jika dibandingkan dengan pemukiman ketika Keraton Buton masih berada di bawah perintah sultan. Pertanyaannya adalah, apakah kita tetap mempertahankan perda tersebut untuk mengatur pemukiman sementara sudah terbukti tidak efektif dan bagaimana dengan lembaga adat kesultanan yang cukup efektif tetapi tidak berfungsi lagi. Dalam konteks ini, judul di atas diajukan untuk mengidentifikasi dan menafsirkan nilai, pengetahuan, adat, teknologi dan lembaga kesultanan dalam hubungannya dengan keteraturan pemukiman di Keraton Buton.

II. Konsentrasi Pembahasan

Ada tiga konsentrasi pembahasan yang kami ajukan dalam artikel ini yaitu :

1. Rekonstruksi ruang pemukiman Keraton Buton
2. Alasan yang mendasari pola pembagian ruang pemukiman Keraton Buton
3. Kearifan lingkungan yang tercermin dari pola pemukiman Keraton Buton

III. Profil Pemukiman Keraton Buton

Keraton Buton merupakan bekas wilayah pusat kerajaan dan juga Kesultanan Buton yang terletak antara 5, 21Ú - 5, 30 LS dan 122, 30Ú - 122, 45Ú BT yang dikelilingi benteng[5] sepanjang 2740 m yang memanjang dari utara ke selatan. Secara administratif pemukiman Keraton Buton merupakan satu wilayah pemerintahan Kelurahan Melai, Kecamatan

[3] Tahap pembangunan Benteng Keraton Buton dimulai sekitar abad ke-16 hingga abad ke-17 pada masa pemerintahan Sultan Buton IV, Sultan La Elangi yang bergelar Dayanu Ikhsanuddin. Benteng ini kemudian diselesaikan pada masa pemerintahan Sultan Buton VI, Sultan La Buke yang bergelar Gafur Wadudu (1632-1645).

[4] Perda tersebut menetapkan Keraton Buton sebagai Kawasan Khusus Kebudayaan.

[5] Sebelum benteng didirikan, pemerintahan dalam bentuk kerajaan telah lama berlangsung sampai dengan Raja Murhum (Raja VI sekaligus menjadi Sultan I). Peralihan dari kerajaan ke kesultanan hanya mengubah bentuk pemerintahan dan keyakinan masyarakat Buton, akan tetapi tidak memindahkan lokasi pusat pemerintahan.

Murhum, Kotamadya Bau-Bau yang terbagi tiga lingkungan yaitu Lingkungan Peropa, Baluwu, dan Dete. Batas wilayah administrasi Keraton Buton adalah: sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Wajo dan Kelurahan Lamangga; sebelah selatan dengan Kelurahan Baadia; sebelah barat dengan Kelurahan Katobengke; dan sebelah timur dengan Kelurahan Sorawolio.

Keraton Buton terletak di perbukitan dengan struktur tanah yang berbatu dan kering. Jenis tanahnya yaitu tanah kambisol, podzolik, dan sebagian besar berupa tanah litosol. Jenis tanah litosol mempunyai sifat tahan terhadap erosi, mudah menyerap air dan dapat menahan tanah dengan baik. Keraton Buton memiliki kemiringan tanah (topografi) mencapai 40 %, dengan ketinggian ± 100 m di atas permukaan laut. Meskipun keadaan tanahnya kurang subur, namun masih terdapat padang-padang rumput dan pepohonan. Musim kemarau yang panjang dan sistem tata air yang kurang menyebabkan tempat ini tidak digunakan sebagai lahan pertanian.

Di masa kesultanan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pemukim di dalam benteng Keraton Buton, pihak kesultanan menarik upeti dari rakyat biasa (*papara*) yang mendiami wilayah *kadie* (desa) dan *barata*[6] yang wajib diserahkan setiap tahun dan disalurkan pada sebuah badan logistik kesultanan yang merupakan menteri urusan pangan (*tamboru*). Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan air sebagai faktor pendukung dalam pemilihan sebuah lokasi pemukiman, masyarakat di pusat kesultanan ini memanfaatkan sumber air dari Sungai Umala dan air hujan. Sungai Umala terletak sekitar 100 meter di luar sisi timur benteng Keraton Buton.

Pemukiman masyarakat di Keraton Buton tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Sungai Umala yang berfungsi sebagai fasilitas air bersih. Berdasarkan data arkeologi dan data sejarah, diduga pemanfaatan fasilitas air di Sungai Umala telah dilakukan sejak lama ketika lokasi ini dipilih sebagai pemukiman. Di Keraton Buton, tidak ditemukan adanya tata air seperti saluran air atau parit yang berisi air (Wijayanti, 1997:113).

Pemanfaatan fasilitas air Sungai Umala secara alami tampaknya berhubungan dengan keadaan lahan di Buton dan mata pencaharian masyarakat. Bentang lahan di Buton yang berbukit-bukit dan tersusun dari batuan kapur dan batuan karang tidak memungkinkan untuk membuat saluran-saluran air. Mata pencaharian masyarakat Buton yang bertumpu pada laut meyebabkan fasilitas air hanya berfungsi praktis untuk kebutuhan air bagi kegiatan rumah tangga dan tidak dipergunakan untuk pengairan bagi kegiatan pertanian. Oleh karena itu, masyarakat memanfaatkan air sungai ini secara alami.

Pola pemukiman di Kota Buton[7] dalam hubungannya dengan mobilitas kegiatan masyarakat, ikut mempengaruhi pula

---

[6] Kaum *papara* merupakan golongan ketiga dalam stratifikasi masyarakat di Kesultanan Buton. *Kadie* merupakan suatu wilayah hukum yang kecil dalam tata negara tradisional Kesultanan Buton, Sedangkan *barata* merupakan daerah yang ditaklukan, yang kemudian memiliki tugas untuk menjaga wilayah terluar dari Kesultanan Buton. Di Kesultanan Buton terdapat 72 *kadie*, 70 *kadie* terletak di luar benteng Keraton Buton dan diperuntukkan bagi golongan *papara*, sedangkan dua *kadie* lainnya berada di dalam benteng Keraton Buton, yang diperuntukkan bagi tempat tinggal sultan dan semua pejabat Kesultanan Buton dari golongan *kaomu* dan *walaka*.

[7] Kota Buton dan Keraton Buton merupakan dua sebutan dan dua wilayah yang berbeda. Kota Buton merupakan wilayah yang meliputi seluruh pemukiman yang ada di Kota Bau-Bau saat ini, sedangkan Keraton Buton hanyalah sebuah areal yang dikelilingi oleh benteng Keraton Buton.

terbentuknya jaringan transportasi khususnya berupa jalan darat yang menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya. Beberapa indikasi yang dapat dipakai untuk mengetahui bentuk jalan adalah distribusi pemukiman penduduk dan fasilitas kota, kondisi lingkungan, bentuk pintu gerbang benteng dan ukurannya. Jaringan jalan di Buton tampaknya mempunyai bentuk yang tidak teratur yaitu jalan yang tidak lurus. Bentuk jalan yang berkelok ini diduga karena pengaruh keadaan lahan di wilayah Kota Buton yang berbukit-bukit.

Secara jelas belum diketahui mengenai bentuk dan ukuran jalan di Kota Buton. Pada areal pemukiman benteng terdapat indikasi bahwa jaringan jalan adalah jalan setapak. Indikasi jalan setapak ini diduga dari bentuk dan ukuran pintu gerbang yang relatif kecil. Letak benteng di perbukitan dengan beberapa pintu gerbang yang dibangun pada lereng bukit sehingga untuk memasuki kawasan ini harus mendaki dengan berjalan kaki.[8] Jaringan jalan yang terdapat pada pemukiman Keraton Buton memiliki pola yang mengelilingi areal benteng dan perumahan penduduk.

IV. Rekonstruksi Ruang Pemukiman Keraton Buton

Pemilihan Keraton Buton sebagai pemukiman disebabkan kondisi geografis wilayah ini yang sangat strategis baik dari segi keamanan maupun ekologis. Keraton Buton yang terletak di puncak bukit dan berhadapan dengan Selat Bau-Bau memudahkan pengawasan terhadap situasi Selat Bau-Bau sebagai pintu gerbang utama keluar-masuk wilayah Kota Buton. Di samping itu, topografi berupa perbukitan yang terjal, sekaligus menjadi benteng pertahanan alami pada Keraton Buton. Hal ini terlihat pada pembangunan benteng Keraton Buton, di mana pada bagian bukit yang terjal, dinding benteng dibangun lebih rendah dan tidak dilengkapi dengan parit pertahanan.

Tata ruang pemukiman Keraton Buton terdiri atas perkampungan penduduk dan fasilitas umum yang kompleks (Febrianah, 2007). Berdasarkan data arkeologis, tata ruang dan fasilitas umum di dalam benteng Keraton Buton terdiri atas perkampungan penduduk, pasar, alun-alun, dan sarana pertahanan, serta ruang sakral berupa tempat peribadatan, makam Sultan Buton, batu pelantikan raja/sultan (*batu popaua*) dan batu petirtaan (*batu gandangi*). Berdasarkan data sejarah, wilayah ini juga meliputi fasilitas administrasi dan pemerintahan (baruga) dan fasilitas pendidikan. Untuk lebih jelasnya, berbagai fasilitas yang terdapat di Keraton Buton akan diuraikan sebagai berikut.

1. Ruang Pemukiman

Pemukiman penduduk tersebar baik di luar benteng maupun di dalam benteng. Golongan bangsawan (*kaomu* dan *walaka*) menempati areal pemukiman di dalam benteng sementara golongan non bangsawan (*papara* dan *batua*) menempati wilayah di luar benteng. Pembedaan ini harus dilakukan karena dua pertimbangan, pertama terbatasnya ruang dalam benteng dan kedua pertimbangan politis.

Dalam pembagian ruang Keraton Buton, pemukiman bangsawan dibangun dengan mengelilingi Masjid Keraton Buton,

[8] Sumber sejarah setempat menggambarkan tata cara penyambutan tamu kesultanan pada masa pemerintah Sultan Buton ke-29 yaitu Muhammad Aydrus (1824-1851). Dalam penyambutan tamu, disediakan beberapa buah usungan di dekat Sungai Umala. Para tamu kemudian dipikul hingga sampai di kaki bukit dekat benteng Keraton Buton. Para tamu kemudian mendaki dengan berjalan kaki hingga ke Keraton Buton.

Pasar Dao Bawo, dan lapangan atau alun-alun. Menurut sejarah, di sekitar pasar juga terdapat bangunan baruga sebagai tempat sultan dan para pembesar kesultanan mengadakan musyawarah atau rapat. Dengan demikian, maka fasilitas ekonomi, peribadatan, dan administrasi terpusat di tengah wilayah pemukiman Keraton Buton.

Secara geologis, ciri topografis yang dijadikan lokasi perumahan adalah permukaan yang bergelombang lemah. Dari data sebaran tembikar dan keramik yang merata di hampir semua permukaan tanah, dapat disimpulkan bahwa semua lokasi tersebut dijadikan sebagai lokasi perumahan (lihat lampiran peta). Sekarang, hanya lokasi datar yang terletak di sisi selatan dan tengah benteng yang cenderung menjadi areal perumahan. Sedangkan di sisi utara hanya ada sekitar 20 rumah saja.

Data arkeologis yang dapat diajukan untuk membuktikan bahwa areal ini adalah areal pemukiman adalah sebaran tembikar dan keramik. Tembikar adalah temuan yang paling banyak dengan bentuk wadah periuk, pasu, kuali dan kendi dengan teknik pembuatan tatap landas dan roda putar lambat. Lebih kurang kurang 30.000 pecahan keramik asing telah ditemukan yang berasal dari masa dan asal yang beragam. Keramik asing tersebut berasal dari China (dinasti Ming dan Ching), Vietnam dan Thailand (Swankhalok). Jumlah terbesar adalah keramik Eropa (Belanda) yang berasal dari abad ke-18 dan 19 (Riyanto dkk, 1995:31).

2. Ruang Pertahanan

Secara topografis, ukuran benteng Buton adalah ukuran maksimal dari permukaan tanah yang dapat dijadikan sebagai areal pemukiman. Tiga sisi benteng merupakan areal dengan kemiringan yang sangat radikal. Selain morfologi benteng itu sendiri, areal miring tersebut juga merupakan benteng alam yang *non-artificial*. Bentuk benteng yang tidak simetris (lihat lampiran peta) disebabkan karena morfologis bentang lahan.

Benteng Keraton Buton menggunakan batuan karang yang banyak terdapat di sekitar pemukiman. Benteng ini dilengkapi dengan sarana pertahanan berupa 16 bastion. Dilihat dari bentuk dan fungsinya, bastion-bastion tersebut dibagi ke dalam dua jenis yaitu bastion sudut (*boka-boka*) yang ditempatkan pada empat sudut benteng dengan maksud sebagai pengawas utama dengan jarak pandang dua arah dan bastion samping (*baluara*) yang merupakan bastion penunjang bagi bastion sudut yang dimaksudkan agar tidak ada satu ancaman pun yang lolos dari pengawasan.

Selain bastion, benteng ini juga dilengkapi dengan sarana peralatan perang berupa meriam berjumlah 72 buah yang terletakkan di setiap bastion. Di samping itu, terdapat parit (*parigi*) di sepanjang sisi luar selatan benteng keraton yang berfungsi sebagai jebakan sekaligus sebagai perlindungan bagi keraton untuk menghadang dan menghambat serangan musuh. Pembangunan parit di sisi luar selatan benteng disebabkan karena di sisi tersebut merupakan daerah yang datar. Benteng juga memiliki 12 pintu gerbang yang berfungsi untuk mengontrol akses masyarakat, baik yang ada di dalam benteng maupun di luar benteng.

3. Ruang Administrasi Pemerintahan

Di pemukiman Keraton Buton tidak terdapat ruang permanen sebagai pusat pemerintahan (istana).[9] Oleh karena itu, jika

[9] Di Kesultanan Buton, rumah sultan (istana) disebut *kamali*.

seseorang diangkat menjadi sultan, maka rumah kediamannya akan digunakan sebagai istana. Jadi, sebenarnya ada banyak istana yang pernah ada, sebanyak sultan yang pernah memerintah. Saat ini, hanya ada dua istana sultan yaitu *kamali kara* yang dibangun pada tahun 1927 dan *kamali bata* yang dibangun pada tahun 1880. Kedua istana tersebut terletak di selatan Masjid Keraton Buton. Istana sultan yang berlokasi tidak permanen hanya merupakan ruang administrasi sekunder. Dengan demikian, letak istana tidak dibedakan dengan letak rumah penduduk di sekitarnya. Ruang administrasi yang sebenarnya adalah baruga (*galampa syara*).

Baruga sebagai tempat administrasi utama kesultanan Buton memiliki lokasi yang permanen. Letaknya di sebelah timur Masjid Keraton Buton. Baruga digunakan sebagai tempat musyawarah bagi Pemerintah Pusat (*Pangka*) antara lain Sultan, *Sapati, Kenepulu, Kapitalau* hingga dewan *Siolimbona*[10] serta merupakan tempat menerima tamu kenegaraan. Di tempat ini dibuat peraturan-peraturan (*apasamo yosara*) yang merupakan mufakat para pejabat kesultanan dan pengambilan keputusan (kehakiman atau peradilan).

4. Ruang Ekonomi

Fasilitas penting lain yang terdapat di Keraton Buton adalah adanya pasar, merupakan ruang ekonomi yang terletak di tengah benteng, berdekatan dengan masjid dan baruga. Menurut sejarah, bentuk Pasar Dao Bawo tidak permanen tetapi lokasi pasar ini tidak pernah berpindah dan peranannya sangat penting dalam sistem perekonomian masyarakat. Adanya pasar di dalam benteng Keraton Buton juga diketahui dari adanya tugas *sapati* sebagai pejabat yang bertugas mengawasi pasar. Bangunan Pasar Dao Bawo yang tidak permanen disebabkan karena adanya fungsi ganda dari ruang tersebut sebagai lapangan atau alun-alun. Fungsi ganda dari pasar Dao Bawo juga menunjukkan indikasi bahwa kegiatan jual beli yang berlangsung di pasar ini tidak berlangsung setiap hari, namun hanya dilakukan pada hari-hari tertentu saja.

Dengan adanya pasar di dalam benteng keraton ini, maka terdapat pula para perajin (juga kaum bangsawan) yang bermukim di dalamnya yaitu para perajin emas, perak, dan perajin besi. Menurut Schoorl (1994:42), kegiatan perdagangan di Buton umumnya dilakukan oleh masyarakat dari golongan *kaomu* dan *walaka*, yang juga memegang jabatan penting dalam elit birokrasi Kesultanan Buton.

5. Ruang Pendidikan

Salah satu media untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yaitu mendirikan sarana pendidikan atau pesantren yang berhubungan erat dengan faktor keagamaan yaitu agama Islam. Berdasarkan sejarah setempat, selain pemukiman penduduk, perkembangan yang cukup pesat terjadi pula pada peningkatan fasilitas pendidikan yaitu pesantren. Disebutkan bahwa pada masa pemeritahan Sultan Muhammad Aydrus, di Kota Buton banyak didirikan fasilititas

---

[10] *Sapati* (wakil sultan, semacam perdana menteri), *Kenepulu* (wakil perdana menteri, yang mengurusi hukum dan adat), dan *Kapitalau* (panglima perang yang memimpin armada laut). Seluruhnya berasal dari golongan *kaomu*. Sedangkan Dewan *Siolimbona* berasal dari golongan *walaka*, yang terdiri atas sembilan orang. Tugas Dewan *Siolimbona* adalah memilih dan memberhentikan sultan. Selain itu, dewan ini juga mengatur pembagian ruang untuk pendirian fasilitas publik seperti istana (*kamali*), masjid, dan bangunan yang berhubungan dengan kepentingan kesultanan.

pesantren yang dibangun di Keraton Buton pada abad ke-18 yaitu pesantren Sin, Zawiyah, dan Galampa Batu.

Berdasarkan penelusuran data di lapangan, ketiga lokasi pesantren tersebut tidak dapat diketahui. Hal ini sangat disayangkan karena seandainya diketahui, penjelasan tentang tata ruang Keraton Buton tentunya akan lebih menarik. Dengan demikian, ruang pendidikan yang ditampilkan dalam lampiran peta adalah ruang dimana perpustakaan terletak. Perpustakaan ini terletak di bagian dalam benteng sisi utara. Perpustakaan tersebut berfungsi sebagai tempat penyimpanan surat-surat dan buku-buku pelajaran keagamaan dan juga untuk mempelajari dan memperdalam kajian-kajian keagamaan. Perpustakaan ini dibangun pada masa La Jampi, Sultan Buton ke-24 yang memerintah tahun 1763-1788 (Anonim, 2005:14).

6. Ruang Sakral

Bila lembar tata kota pemukiman kuno dibuka, ruang sakral selalu menjadi ruang yang istimewa. Dalam pembagian ruang di Keraton Buton, kita akan menemukan sebuah kontradiksi besar. Inilah karakter dari pola pemukiman Keraton Buton. Meskipun letak masjid, batu pelantikan raja/sultan dan batu petirtaan berada pada sentrum pemukiman, tetapi sebaran makam yang juga merupakan bangunan sakral tidak memperlihatkan keteraturan. Sebaran makam Keraton Buton memperlihatkan gejala yang menyimpang jika dibandingkan dengan gejala penempatan makam pada pemukiman lain seperti pada pemukiman-pemukiman kuno di Sulawesi Selatan. Makam di Buton yang tidak terkonsentasi biasanya ditempatkan pada halaman rumah, pinggir jalan, sisi benteng atau areal-areal yang kosong.

Penempatan masjid, batu pelantikan, batu petirtaan pada sentrum pemukiman dan makam yang tersebar serampangan disebabkan karena fungsi monumen-monumen ini. Tiga monumen yang pertama disebut merupakan monumen publik yang sewaktu-waktu dapat diakses. Jadi sangat wajar bila letaknya berada pada sentrum pemukiman. Lagi pula, secara horisontal, tidak ada kecenderungan tiga monumen ini akan bertambah lebar. Sedangkan makam yang bukan merupakan monumen publik wajar bila ditempatkan secara serampangan karena alasan ketersediaan lahan, apalagi mengingat kecenderungan makam yang secara horisontal akan semakin bertambah luas setiap hari.

V. Pertimbangan Pemilihan Lokasi

Yang dimaksud pertimbangan pemilihan lokasi pada bagian ini adalah alasan pemilihan lokasi pemukiman Keraton Buton, bukan alasan pembagian ruang yang ada di dalamnya. Kami menemukan satu pertimbangan utama dalam pemilihan lokasi Keraton Buton yaitu faktor keamanan. Dari segi *landscape*, kesuburan tanah dan ketersediaan sumber air, sebenarnya ada banyak tempat yang lebih memungkinkan untuk dipilih sebagai lokasi pemukiman. Tetapi, lokasi-lokasi yang lebih subur tersebut memiliki tingkat keterancaman yang sangat tinggi karena banyaknya perompak laut. Ancaman permanen Keraton Buton datang dari suku Tobelo di Maluku Utara, selain Belanda dan Makassar.

Meskipun dataran tinggi yang ditempati Keraton Buton dari segi daya dukung (*carrying capacity*) sangatlah kecil tetapi lokasi ini sangat sulit untuk dijangkau. Letaknya pada daerah ketinggian memungkinkan untuk mengontrol kapal yang masuk ke selat bau-bau. Inilah alasan yang paling masuk akal bila dihubungkan dengan konstelasi politik

yang berlangsung pada abad ke-17. Kelebihan lain dari lokasi ini adalah meskipun benteng berupa susunan batu karang dibuat, topografi sekitarnya juga merupakan benteng alam yang sulit ditembus karena tiga sisinya dikitari oleh daerah yang terjal.

Meskipun alasan pemilihan lokasi karena faktor keamanan telah diketahui, menguraikan kelangsungan pemukiman Keraton Buton tidak sesederhana itu. Penjelasan lain tentang faktor yang mempengaruhi kelangsungan pemukiman Keraton Buton selama berabad-abad adalah penjelasan tentang pembagian dan fungsi setiap ruang yang dibedakan di dalam pemukiman tersebut. Logika yang paling sederhana adalah bagaimana mungkin areal pemukiman yang hanya seluas 2,740 meter panjang keliling dapat mengakomodasi kebutuhan pemukim akan ruang.

Dari enam ruang yang dibedakan di atas, hal yang paling menarik adalah tiga ruang publik (masjid, alun-alun/pasar serta baruga) yang berada di tengah areal pemukiman Keraton Buton. Sebagai ruang publik dimana semua pemukim dapat mengaksesnya secara cepat, ketiga ruang tersebut sangat tepat berada di tengah pemukiman. Pemilihan lokasi ketiga bangunan ini sangat jelas didasarkan pada alasan supaya masyarakat mengeluarkan energi yang kurang lebih sama dalam mengaksesnya. Pertimbangan pengeluaran energi sangat penting untuk diperhatikan dalam sebuah pemukiman karena aktivitas dan interaksi dapat berlangsung setiap saat. Dapat dibanyangkan bila ketiga bangunan publik ini berada di sisi selatan, pemukim yang berada di sisi utara akan sangat kesulitan untuk mencapainya, sementara ketiga bangunan tersebut harus diakses setiap hari. Bila demikian, tercipta *ketidakadilan ruang* dimana akan berakibat pada kurang kondusifnya sistem pemukiman.

Sampai di sini, kita tiba pada kesimpulan bahwa ketiga ruang publik inilah (ruang sakral, ruang ekonomi, dan ruang administrasi) yang merupakan sentrum dari pemukiman Keraton Buton, bukan istana sultan. Kita akan dengan mudah membedakan pola keruangan pemukiman Keraton Buton dengan pola keruangan di Keraton Jogjakarta yang sampai sekarang masih jelas terlihat. Di Jogjakarta, sentrum pemukiman adalah istana sultan (istana Jogjakarta) dan semua fasilitas pemukiman mengambil patokan orientasi dari istana tersebut. Singkatnya, fasilitas publik sebagai sentrum pemukiman di Keraton Buton lebih menonjolkan aspek egaliter dimana kepentingan kolektif sangat diperhatikan. Sangat berbeda jika dibandingkan dengan istana sebagai sentrum seperti terlihat di Jogjakarta.

Sarana pertahanan yang melingkupi areal perumahan dan ruang-ruang lain dalam benteng terlihat sangat dipengaruhi oleh morfologi bentang lahan. Bentuknya yang tidak simetris (lihat lampiran peta) disebabkan karena memang sangat tidak memungkinkan dimana sisi utara dan timur adalah daerah terjal. Dari segi geomorfologis, inilah bentuk pemukiman yang paling ideal. Denah benteng Keraton Buton menggambarkan dengan jelas bagaimana bentuk adaptasi pemukim terhadap lingkungan yang ada. Ukurannya yang sangat terbatas (2.740 m panjang keliling) untuk pemukiman memaksa lembaga adat harus mengatur dengan tegas pembagian ruang dalam areal perbentengan tersebut.

Ruang pemukiman penduduk menyebar di dalam areal benteng yang memudahkan pemukim untuk berbaur dan berinteraksi satu sama lain. Meskipun terdapat perbedaan status dan peran dalam pemerintahan antara golongan *kaomu* dan

golongan *walaka*, tidak ada pengaturan ruang yang jelas tentang dua jenis stratifikasi sosial ini. Walaupun demikian, sebagian besar golongan *kaomu* tinggal di Lingkungan Kompani di sisi selatan dan Lingkungan Rakia di sisi utara benteng. Di Lingkungan Kompani terdapat dua tinggalan *kamali* yang hingga kini masih terlihat. Adanya kedua *kamali* tersebut mengindikasikan bahwa tempat ini dahulu merupakan pemukiman golongan *kaomu*. Menurut salah seorang informan,[11] penempatan golongan *kaomu* di Lingkungan Rakia, disebabkan karena berdekatan dengan pusat-pusat kegiatan seperti ritual keagamaan (masjid dan tempat pelantikan sultan), kegiatan ekonomi (pasar), dan kegiatan belajar (perpustakaan).

Penempatan ruang sakral di bagian tengah berupa *batu gandangi* dan *batu popaua* di masa kerajaan, serta masjid pada masa kesultanan mengindikasikan adanya semacam penetapan ruang sakral pada lokasi tertentu, meskipun telah terjadi peralihan kepercayaan dari masa pra-Islam ke masa Islam. Di dalam pemukiman Keraton Buton, sesuatu yang dihormati masyarakat tampaknya diletakkan pada lokasi yang khusus yaitu pada areal yang lebih tinggi atau sengaja ditinggikan. Hal ini dapat diketahui dari keletakan Masjid Keraton Buton yang lebih tinggi dari wilayah sekitarnya dan *batu gandangi* yang berada di atas Bukit Lelemangura.

Tentang pendirian makam yang termasuk kategori bangunan sakral, tata letak bangunan makam di Keraton Buton sangat berbeda jika dibandingkan dengan tata letak bangunan makam Islam yang umumnya terdapat di Indonesia. Menurut Guillot dan Chambert-Loir (2007:338-339) pada umumnya makam ditempatkan pada ketinggian, misalnya di puncak bukit atau gunung karena gunung dipandang sebagai lokasi keramat, tempat para dewata bersemayam. Inilah konsepsi yang sangat universal berlaku pada penempatan bangunan makam di Indonesia.

Di pemukiman Keraton Buton, tata letak bangunan makam ditemukan tersebar dalam benteng. Kira-kira terdapat 40 kompleks makam yang dapat diidentifikasi di dalam benteng Keraton Buton, ada kubur tunggal dan ada kuburan yang mengelompok, tersebar pada ketinggian yang bervariasi. Untuk makam yang berkelompok, jumlah populasi yang dimakamkan kurang lebih 5-10 populasi. Kebanyakan makam tersebar di halaman rumah, di dekat benteng, di pinggir jalan, dan di samping masjid. Pada dasarnya tidak ada lahan khusus yang diperuntukkan untuk lokasi penguburan. Gambaran kasus makam Buton, baik dari segi tata letak maupun besaran populasi kubur memperlihatkan suatu perilaku adaptasi terhadap lingkungan dan merupakan karakter bangunan makam yang sangat khas jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa keterbatasan lahan mengharuskan pemukim untuk mengatur seefektif mungkin ruang yang ada. Sementara di sisi lain, secara horisontal, kecenderungan kompleks makam akan semakin meluas seiring dengan bertambahnya orang yang meninggal dunia. Empat puluh kompleks makam dalam satu areal seluas 2.740 m panjang keliling adalah satu gambaran yang jelas bagaimana ruang (baca lingkungan) betul-betul dimanfaatkan dengan baik. Seandainya semua populasi

[11] Wawancara dengan Hazirun Kudus (tokoh masyarakat yang berdomisili di Keraton Buton). Wawancara dilakukan pada bulan Agustus 2007.

kubur dalam Keraton Buton ditempatkan dalam satu areal, tentunya akan menyebabkan ketimpangan ruang dan mendesak ruang perumahan. Gejala kubur ini penting untuk diteliti lebih lanjut karena sifatnya yang sangat spesifik.

VI. Refleksi Kearifan Lingkungan Dalam Sistem Pemukiman

Sistem pemukiman adalah sebuah warisan kolektif dari para pendahulu pemukiman tersebut yang diwariskan secara turun temurun. Tidak sesederhana yang dibayangkan, pemukiman Keraton Buton ternyata cukup kompleks dengan pembagian ruangnya, hubungan-hubungan di dalamnya serta pertimbangan-pertimbangan pemilihannya. Inilah bentuk kearifan lingkungan yang diwariskan dari sistem pemukiman Keraton Buton.

Keteraturan dalam sebuah sistem pemukiman tidak tercipta begitu saja melainkan didesain sedemikian rupa. Di dalamnya termuat pertimbangan, alasan dan kesepakatan. Peranan pengaturan sangat signifikan karena di dalam sistem pemukiman terjadi interaksi dan proses transformasi barang, energi dan keanekaan. Dalam sejarah pertumbuhan komunitas, bentuk pemukiman seperti Keraton Buton tidak mungkin tercipta tanpa diatur oleh sebuah lembaga yang mapan. Lembaga tersebut adalah Dewan Kesultanan Buton, suatu wadah dimana norma dipertahankan, diubah, dan dielaborasi sesuai dengan kebutuhannya. Dewan Kesultanan Buton (*Sarana Wolio*) dalam hal ini *Siolimbona* menjaga adat dan tradisi termasuk aturan dalam pendirian dan penempatan bangunan. *Siolimbona* inilah yang memungkinkan terciptanya keseimbangan (*equilibrium*) dalam sistem pemukiman Keraton Buton.

Dalam perspektif kearifan lokal, keberadaan *lembaga adat* merupakan indikator sebuah adat dapat disebut mewarisi kearifan lokal, selain *sistem nilai, pengetahuan dan teknologi tradisional* (Anonim, 2007:xix). Pemukim Keraton Buton memelihara sistem nilai yang dikontrol oleh *Siolimbona*. Sistem nilai tersebut didasarkan pada nilai-nilai agama. Agama adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Ada ungkapan yang sangat populer oleh pemukim setempat yang mengatakan bahwa, *biarlah harta, badan, negeri dan dewan binasa asal agama selamat*. Dalam konteks ini, agama menjadi sumber dari sistem nilai dan pengetahuan masyarakat.

Sistem pengetahuan masyarakat diperoleh dan dibentuk oleh lingkungan. Karena itu, keseimbangan dalam mengekploitasi lingkungan harus selalu dijaga. Ruang pemukiman sebagai salah satu bentuk lingkungan menjadi bagian yang sangat penting bagi masyarakat. Interaksi yang panjang antara pemukim dengan lingkungan pemukiman yang sangat terbatas ukurannya secara horisontal menimbulkan suatu sistem pengetahuan untuk memanfaatkan lingkungan seefisien mungkin. Sistem pengetahuan inilah yang diwariskan secara turun temurun dan dijalankan oleh dewan *Siolimbona*.

Dalam manifestasinya, sistem nilai dan pengetahuan yang dijalankan secara turun temurun oleh lembaga *Siolimbona* diwujudkan oleh sistem teknologi tradisional misalnya teknologi membuat dan merancang pemukiman yang dilingkupi oleh perbentengan. Dalam kondisi sekarang, dihapuskannya Kesultanan Buton pada tahun 1960 mengakibatkan lenyapnya lembaga adat kesultanan yang telah mempertahankan keseimbangan sistem pemukiman.

Akibatnya adalah tidak ditemukan lagi keteraturan ruang dalam sistem pembagian ruang pemukiman Keraton Buton sekarang. Gejala ini adalah isyarat bahwa pemukiman Keraton Buton di masa mendatang akan mengalami ketimpangan ruang karena Perda yang ada tidak dapat secara efektif mengatur penggunaan ruang di dalam keraton. Meskipun demikian dan walaupun sudah terlambat, bukan berarti bahwa kecenderungan (*trend*) ketimpangan ruang di masa mendatang tidak dapat dieliminir.

VII. Penutup

Walaupun kearifan lingkungan pada pemukiman keraton sudah tidak diwariskan lagi dan lembaga adat telah dibubarkan bersamaan dengan berakhirnya Kesultanan Buton pada tahun 1960, sebaran temuan arkeologis ditambah beberapa data sejarah dan etnografi masih memungkinkan untuk diungkap. Gejala pembagian ruang dalam pemukiman Keraton Buton adalah hasil interaksi pemukim dengan lingkungan. Selama empat abad, pemukiman ini bertahan dan *equilibrium*nya terjaga. Faktor yang memungkinkannya bertahan adalah eksistensi lembaga kesultanan yang berhasil mengatur sistem nilai, pengetahuan dan teknologi.

Kami bukan menyarankan untuk menghidupkan kembali suasana masa kesultanan tetapi mungkin dengan mengadopsi model-model pengaturan ruang pada masa kesultanan dapat memecahkan beberapa permasalahan keruangan yang terjadi di dalam pemukiman Keraton Buton. Akhirnya, kami menyarankan untuk mengeksplor lebih jauh kajian keruangan Keraton Buton dengan menggunakan *tools* analisis yang lebih beragam dan lebih multidisipliner di masa mendatang.

Daftar Pustaka

Anonim. 2005. *Buku Panduan (Trail Map) Benteng Wolio*. Pusat Kajian Indonesia Timur (PUSKIT) Universitas Hasanuddin bekerjasama dengan Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Bau-Bau.

Anonim. 2007. "Mengungkap Kearifan Lokal Lingkungan Sulawesi Selatan". *Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Sulawesi Selatan, Maluku dan Papua. Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI*. Makassar: Masagena Press.

Ashmore, Robert J. dan Wendy Ashmore. 1979. *Fundamentals of Archaeology*. California: Benyamin/ Cummings Publishing Company, Inc.

Febrianah. 2007. "Studi Pemukiman Tingkat Semi Mikro Terhadap Situs Benteng Wolio Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara". ***Skripsi***. Makassar: Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.

Guillot, C. dan H. Chambert-Loir. 2007. "Indonesia". Dalam Henri Chambert-Loir dan Claude Guillot. *Ziarah dan Wali Dalam Dunia Islam*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta bekerjasama dengan École française d'Extrême-Orient dan Forum Jakarta-Paris.

Mundardjito. 2002. *Pertimbangan Ekologi: Penempatan Situs Masa Hindu-Budha di Daerah Yogyakarta*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra bekerjasama dengan École Française d'Extrême-Orient.

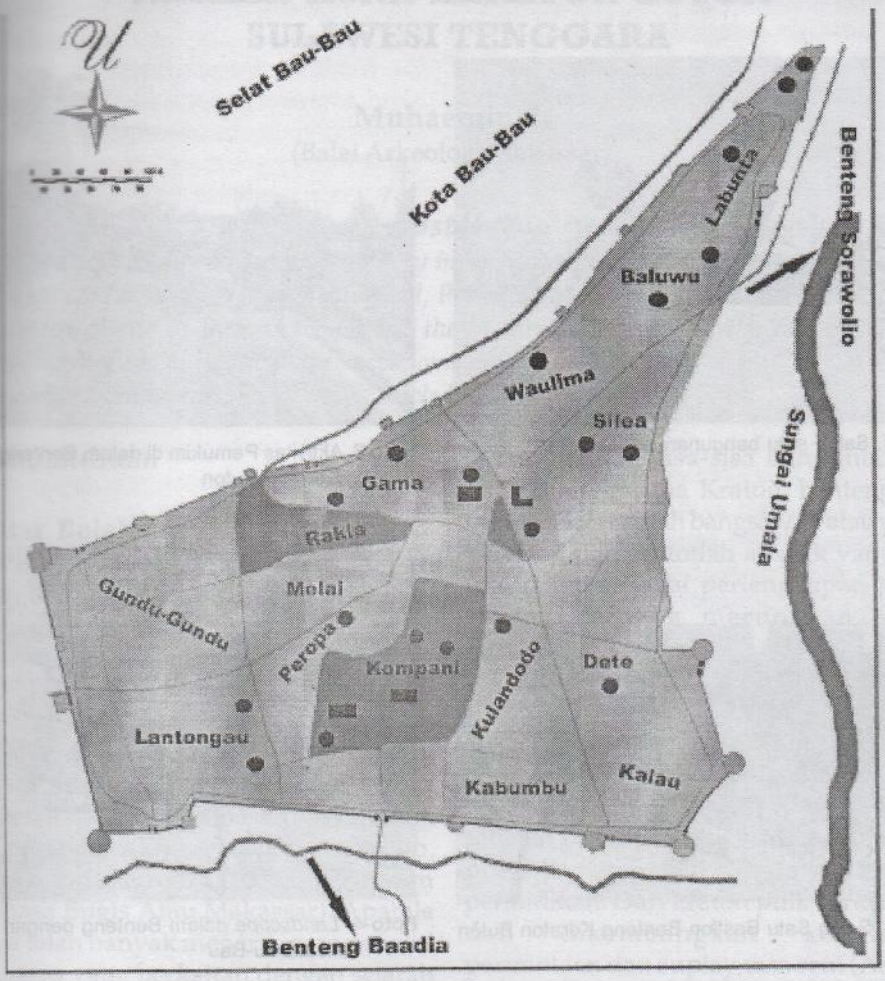
Riyanto, Sugeng (dkk). 1995. *Ekskavasi dan Survei Arkeologi Islam di Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara*. Jakarta. Puslit Arkenas.

Schoorl, J.W. 1994. "Power, Ideology, and Change in the Early State of Buton". *State and Trade in Indonesian Archipelago*. Leiden: KITLV Press.

Wijayanti, Nunuk. 1997. "Pemukiman Kota Buton abad XVII-XIX". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada.

Zahari, Abdul Mulku. 1977. *Sejarah dan Adat Fiy Darul Butuni (Buton)*. Jilid I. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

PETA PEMBAGIAN RUANG PEMUKIMAN KERATON BUTO



Keterangan:
- Ruang Pemukiman
- Ruang Pertahanan (bastion)
- Ruang Administrasi Pemerintahan
- Ruang Ekonomi (Pasar)
- Ruang Pendidikan (Perpustakaan)
- Ruang Sakral
- Pemukiman golongan *kaomu*

Lampiran Foto :



Foto 1. Salah satu bangunan istana sultan

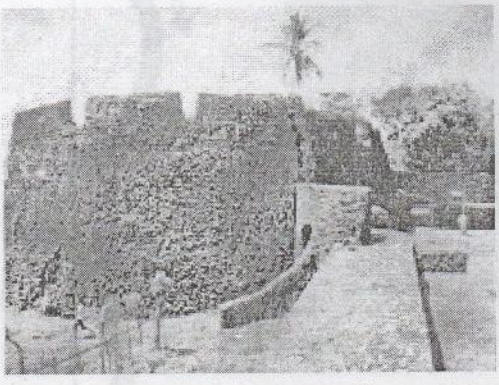


Foto 2. Salah Satu Bastion Benteng Keraton Buton

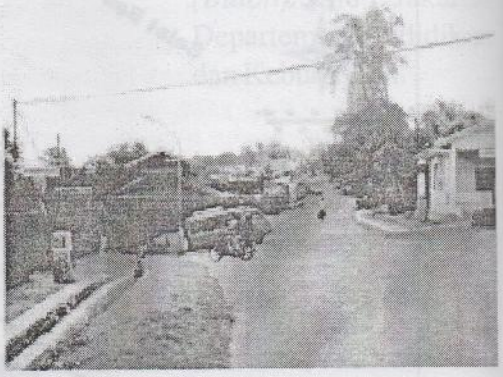


Foto 3. Aktivitas Pemukim di dalam Benteng Keraton Buton

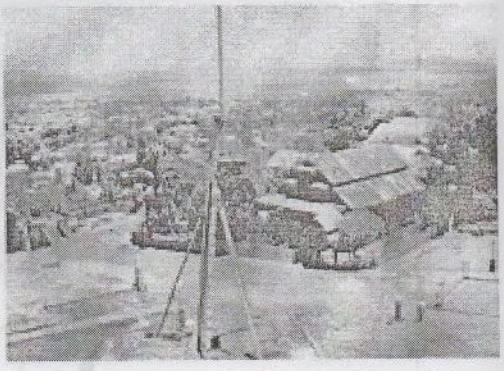


Foto 4. *Landscape* dalam Benteng dengan Latar Kota Bau-Bau